

INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL

Indicators of Mass Tourism Development Policy in Small Islands

*Mira

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260
Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159
*email: miraclenia@yahoo.com

Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 3 Juni 2014

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator kebijakan pembangunan wisata masal di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, penelitian ini penting dilakukan karena kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di Kepulauan Seribu, yang dibiayai oleh Universite de La Rochelle. Indikator kebijakan pembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000), Shaw et william (2002) et Cournoyer (2005). Ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari karakteristik atraksi (aspek wisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan, pembangunan ditujukan secara eksklusif untuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai dan berjemur. Dari indikator kebijakan tekanan, aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial di pulau yang dikelola oleh swasta membuat aspek sosial terabaikan. Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikator kebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkan dua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaan wisata. Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, karena pembangunan wisata dilakukan secara ekstensif, dan pembangunan wisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal, karena pengembangan wisata tidak dilakukan secara ekstensif, dan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat lokal. Kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swasta sangat lemah.

Kata Kunci: wisata masal, indikator, pulau-pulau kecil, atraksi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze indicators of mass tourism development in small islands. The study was conducted 2012 at Seribu Archipelago (Pramuka, Panggang, Karya, Bidadari, Ayer besar, Untung Jawa, Onrust, Cipir, Kelor, and Rambut Island). Indicators of mass tourism development policy refer to the parameters set by Weaver (2000), Shaw et William (2002) et Cournoyer (2005). The results of the study analysis indicates, firstly (Policy Indicators Attraction, the islands are managed by private companies, practice the principles of mass tourism, because it is commercial, generic, homogen, and exclusive. Secondly, the islands are managed by government and community local, not practice the principles of mass tourism, because it is not extensive, eclusive, and it has high multiplier effect for local community. the islands are managed by private companies do not involve the local communities. Although it is expected from the management of the tourism development that they should involve the local communities. Control of government and society to the rule of tourist development on the island are managed by the private sector is very weak.

Keywords: mass tourism, indicators, small island, attraction

PENDAHULUAN

Sebuah konferensi internasional mengenai kaitan perubahan iklim dan pembangunan wisata pada Oktober 2007 yang diadakan oleh Organisasi Wisata pada tingkat dunia dan organisasi lainnya. Hasil dari konferensi sepakat bahwa kebijakan pembangunan wisata harus merespon perubahan iklim, dimana sebaiknya pembangunan wisata yang dilakukan harus mengurangi dampak efek gas rumah kaca dengan mengubah model pembangunan wisata dari wisata masal ke wisata yang berkelanjutan (UNWTO, 2005). Penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan, bukan wisata masal, diharapkan akan mengurangi jumlah gas karbon akibat kegiatan transportasi dan hotel dari sektor wisata (Fly *et al.*, 2008), karena itu sebaiknya dibatasi aksesibilitas dan jumlah hotel.

Kebijakan wisata masal (artinya dari segi volume bersifat masif), hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan tidak memperhatikan partisipasi masyarakat lokal. Wisata masal merepresentasikan jaringan modal korporasi dunia seperti jaringan Hilton, Le Meridian, dan lain-lain. Sebaliknya kurang memperhatikan ekonomi lokal dengan menggunakan produk impor ketimbang produk lokal. Pembangunan wisata masal dikritik karena banyak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengubah sosial budaya suatu masyarakat lokal (Uyarra *et al.*, 2009).

Prinsip pembangunan wisata masal, menurut pendapat (Weaver, 1991) berhubungan dengan tipe penginapan, pasar wisata, dan struktur ekonomi. Prinsip-prinsip pembangunan wisata masal diterapkan, pada awal pembangunan wisata di Kepulauan Hawaii, Kepulauan Komoro, Kepulauan Karibia, dan Kepulauan Baléares (Bardoles, 2008). Hal itu dengan ditandai pembangunan wisata hotel dan restoran kelas dunia. Namun saat ini pemerintahan kepulauan tersebut telah mengubah strategi pembangunannya dari wisata masal ke wisata berkelanjutan, karena mengingat pulau-pulau kecil sangat sensitif terhadap tekanan lingkungan.

Salah satu kebijakan untuk mengelola sebuah tempat wisata yang sangat sensitif terhadap dampak kunjungan wisata (karena berupa pulau-pulau kecil) dengan mengurangi akses ke tempat wisata. Dalam lokasi penelitian ini (di Kepulauan Seribu), contohnya Pulau Rambut adalah sebuah taman nasional untuk konservasi burung dan

satwa pesisir, sudah ada kebijakan pembatasan jumlah pengunjung dengan berbagai cara misalnya dengan meniadakan jalan, tempat penginapan, sumber air tawar, dan restaurant. Di Kepulauan Seribu lainnya, seperti di Pulau Kelor, Onrust, dan Cipir tidak ada pembangunan hotel dan bungalow untuk menjaga peninggalan bersejarah yang dibangun oleh Belanda dari tekanan pengunjung. Seharusnya kebijakan pembangunan hotel dan penginapan di Pulau Panggang, Pramuka, dan Karya harus dibatasi karena pulau-pulau ini dikelilingi oleh ekosistem terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan akibat pembangunan wisata. Bagaimana indikator kebijakan pembangunan wisata masal di pulau-pulau kecil itulah tujuan dari tulisan ini.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pulau-pulau kecil, yaitu di Kepulauan Seribu bagian utara diwakili oleh Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Karya. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu bagian selatan diwakili oleh Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Bidadari, dan Pulau Ayer Besar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 yang dibiayai oleh Universitas de La Rochelle (Perancis) melalui program beasiswa.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dari pengunjung, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan stakeholder terkait pengembangan wisata di Kepulauan Seribu. Data sekunder diperoleh dari laporan Bappeda, Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan Dinas Pariwisata, dan Buku Kepulauan Seribu Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu.

Metode Analisis Data

Sebuah kepulauan merupakan gugusan pulau yang terdiri dari beberapa pulau yang menjadi satu kesatuan entitas dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya Bardulet et Sheldon (2008). Banyak pulau-pulau di dunia yang merupakan bagian dari sebuah kepulauan. Pulau-pulau dan kepulauan yang merepresentasikan sebuah keunikan dalam kebijakan pembangunan wisata. Objek penelitian

kita berbeda dengan Vancouver dan Cairns yang menerapkan wisata masal, Kepulauan Seribu merupakan sebuah kawasan konservasi yang terbentuk dari gugusan pulau kecil yang sangat rawan terhadap aktivitas manusia (pemanfaatan lahan dan polusi).

Menurut Stock *et al.* (2006), dalam sebuah kawasan wisata yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti kawasan konservasi, maka sebaiknya ada kebijakan pembatasan frekuensi kunjungan wisata atau dengan kata lain pembangunan wisata tidak bersifat masal. Pembatasan tersebut bisa berupa kebijakan dimana sebuah kawasan wisata dibuat dengan membatasi aksesibilitas, seperti membatasi jumlah parkir. Pembangunan wisata pada kawasan yang rawan terhadap perubahan lingkungan perlu dilakukan kajian yang mendalam antara aktivitas yang dilakukan dan aksesibilitas terhadap kawasan tersebut. Seperti saran Stock (2006) dan Sorupia (2005) yang sepakat bahwa daerah tujuan wisata

dalam kawasan konservasi dianjurkan untuk membatasi aksesibilitas. Itulah salah satu alasan kenapa Bakosurtanal tidak memasukan sistem transportasi dalam parameter pendukung untuk pengembangan pariwisata bahari dan pariwisata pantai.

Model pembangunan wisata masal/tidak masal ditentukan oleh beberapa indikator kebijakan dengan melihat 5 aspek. Lima aspek tersebut adalah atraksi, pasar, struktur ekonomi, akomodasi, dan peraturan. Pada model pembangunan wisata masal ini dilakukan secara kualitatif juga dilakukan secara kuantitatif deskriptif. Teknik kualitatif dilakukan dengan mewawancarai responden secara mendalam. Teknik Kuantitatif deskriptif dilakukan dengan kuesioner berupa pilihan yang dibobot. Variabel dari pembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000), Shaw dan william (2002), dan Cournoyer (2005). Masing-masing dari pembangunan wisata masal bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Variabel Pembangunan Wisata Masal.
Table 1. Variable of Mass Tourism Development.

Pembangunan Wisata Masal/ Mass Tourism Development				
Parameter atraksi/ <i>Attraction parametre</i>	Parameter Pasar/ <i>Market parametre</i>	Parameter Struktur Ekonomi/ <i>Parametre of Economic structur</i>	Parameter Akomodasi/ <i>Accomodation parameter</i>	Parameter peraturan/ <i>Law parametre</i>
Pembangunan wisata terlalu komersial/ <i>Comercial</i>	Bersifat masif dan tur diorganisasi oleh tur wisata/ <i>Masif</i>	Sektor wisata mendominasi perekonomian/ <i>Tourism sector dominates the economy</i>	Akomodasi dilakukan pada skala besar/ <i>Large scale accomodation</i>	Peraturan dikontrol oleh sektor swasta/ <i>Law controlled by private sector</i>
Bersifat homogen dan tidak natural/ <i>Homogen</i>	Adanya musim kunjungan wisata/ <i>peak/low season</i>	Memiliki hubungan yang didominasi dari luar/ <i>Tourism dominated by the other country</i>	Pembangunan terkonsentrasi pada zona wisata/ <i>Concentracion developpement on tourism sector</i>	Kuantitas aturan yang dibuat sangat minim dan hanya mengakomodasi kepentingan swasta/ <i>Rules just accommodate the private interests</i>
Hanya ditujukan eksklusif untuk turisme/ <i>Exlusive for tourism</i>	Pasar wisata didominasi turis asing/ <i>Tourism market dominated by foreigner</i>	Ektensif/ <i>Extensive</i>	Kepadatan bangunan tinggi/ <i>High accomodation</i>	Menganut ideologi pasar bebas/ <i>Market free ideology</i>
Menjual pantai, matahari, taman bermain, dan peninggalan industri/ <i>Sun, sea, and beach</i>	Elastis pada harga/ <i>Elasticity of the price</i>	<i>Multiplier effect</i> sangat rendah/ <i>Low multiplier effect</i>	Akomodasi memiliki gaya internasional/ <i>The accommodation has an international style</i>	Aturan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi/ <i>Rule- oriented economic growth</i>
-	-	-	Akomodasi milik perusahaan besar non lokal/ <i>Owner of accomodation is big non local company</i>	-

Sumber : Weaver (2000), Shaw dan william (2002), dan Cournoyer (2005)
Source : Weaver (2000), Shaw dan william (2002), dan Cournoyer (2005)

Indikator Kebijakan Pembangunan Wisata Masal / Non-Masal

Indikator Kebijakan Dari Parameter Atraksi

Pulau yang wisatanya dikelola oleh pemerintah adalah Pulau Onrust, Cipir, dan Pulau Kelor dan Pulau Karya), pulau yang wisatanya dikelola oleh swasta adalah Pulau Bidadari dan Pulau Ayer Besar, pulau yang wisatanya dikelola oleh masyarakat adalah Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, dan Pulau Panggang. Pulau yang dikelola oleh masyarakat lokal tidak menerapkan satu pun dari indikator kebijakan pembangun wisata masal jika dilihat dari parameter atraksi. Variabel dari pembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000), Shaw dan william (2002), dan Cournoyer (2005). Kebijakan pembangunan wisata tidak terlalu komersial, karakter wisata tidak homogen, generik, dan artifisial. Antara satu pulau pemukiman dengan pulau pemukiman lainnya atraksi wisata yang ditawarkan relatif berbeda,

misalnya Pulau Untung Jawa menawarkan atraksi aktivitas bermain di pantai, sedangkan di Pulau Pramuka menawarkan atraksi wisata bawah laut. Pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat lokal tidak hanya ditujukan untuk pembangunan wisata juga ditujukan untuk pembangunan budidaya akuakultur dan pemukiman.

Pada Tabel 2, hal yang sama juga berlaku pada pulau-pulau yang dikelola oleh pemerintah, tidak menerapkan satu pun dari indikator kebijakan pembangun wisata masal jika dilihat dari parameter atraksi. Pembangun di pulau ini untuk melindungi peninggalan sejarah Belanda dan dijadikan atraksi wisata untuk memperkenalkan generasi muda terhadap sejarah penjajahan Belanda (Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor). Sedangkan pengelolaan pulau Rambut untuk konservasi hewan dan tumbuhan langka, pengunjung yang datang untuk melihat atraksi dari burung, biawak, dan tumbuhan pesisir. Jadi antara satu pulau dengan pulau lain tidak homogen karakternya.

Tabel 2. Indikator Kebijakan Wisata Masal Dari Parameter Atraksi.
Table 2. Mass Tourism Policy Indicator From Attraction Parametre.

Elemen/Element	Karakter dari wisata masal/Mass tourism caracter	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta /Island managed by private company	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh masyarakat / / Island managed by community	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh pemerintah / /Island managed by government
Tekanan/Pressure	Pembangunan wisata terlalu komersial/ <i>Commercial tourism development</i>	Pembangunan wisata terlalu komersial*/ <i>Commercial tourism development</i>	Pembangunan wisata tidak terlalu komersial* / <i>Not-comercial tourism development</i>	Pembangunan wisata tidak terlalu komersial* / <i>Not-comercial tourism development</i>
Karakter/ Character	Bersifat homogen dan tidak natural (karakter tujuan wisata satu dengan yang lainnya sama)/ <i>Homogene and unnatural</i>	Bersifat homogen dan generic/ <i>Homogene and generic</i>	Heterogen / <i>Heterogene</i>	Heterogen / <i>Heterogene</i>
Orientasi/ Orientation	Hanya ditujukan eksklusif untuk turisme/ <i>Exlusive for tourism</i>	Hanya ditujukan eksklusif untuk turisme / <i>Exlusive for tourism</i>	Wisata dan pemukiman/ <i>Tourism and settlement</i>	Wisata dan konservasi/ <i>Tourism and conservation</i>
Jenis/ Type	Menjual pantai, matahari, taman bermain, dan peninggalan industri / <i>Sun, sea, beach</i>	Menjual pantai, matahari, taman bermain/ <i>Sun, sea, beach</i>	Selam dan pengamatan satwa/ <i>Snorkeling</i>	Peninggalan sejarah/ <i>Historic tourism</i>
Kesimpulan/ Conclusion		Wisata masal/ <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal / <i>Non-mass tourism</i>	Wisata non-masal / <i>Non-mass tourism</i>

Sumber : Pengamatan, wawancara dan Analisa peneliti, 2012/Source : *Observation, interview and data processed, 2012*
Ket: * Dilakukan dengan kuantitatif deskriptif dengan pembobotan

Ditinjau dari indikator kebijakan parameter atraksi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari elemen atraksi (tekanan, karakter, orientasi, dan tipe wisata) dan karakteristik atraksi (aspek wisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan artifisial, pembangunan ditujukan secara eksklusif untuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai, berjemur, dan taman bertema). Pulau Bidadari dan Ayer Besar hanya ditujukan untuk aktivitas wisata, karena pemilik pulau berinvestasi di pulau ini untuk pembangunan wisata, bukan untuk aktivitas pemukiman apalagi aktivitas konservasi. Okupasi lahan ditujukan untuk kenyamanan aktivitas pengunjung, seperti kolam renang, taman bermain, heliport, restoran, dan penginapan.

Dari sisi tekanan, aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial di pulau yang dikelola oleh swasta membuat aspek sosial terabaikan. Pengabaian aspek sosial bisa dilihat dari minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan. Pemilik pulau sekaligus pemilik hotel dan restaurant lebih suka merekrut karyawan non lokal, karena minimnya tingkat pendidikan dan tidak adanya pengalaman di bidang jasa wisata. Tujuan utama wisata di pulau ini untuk memperoleh penghasilan

yang besar dan menekan biaya, penekanan biaya itu bisa dilihat tidak adanya instalasi pengolahan limbah, sehingga limbah domestik dibuang secara langsung ke laut. Dari sisi karakter wisata, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta bersifat generik, homogen, dan artifisial. Hal ini bisa dilihat dari atraksi yang ditawarkan bersifat homogen (aktivitas bermain di pantai, berenang, *outbond*, dan *jet ski*).

Indikator Kebijakan Dari Parameter Pasar

Dari indikator kebijakan pasar, empat elemen yang dimiliki (volume, musim kunjungan, asal turis, dan permintaan) mengindikasikan pulau-pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta menerapkan pengembangan wisata masal. Kita bisa melihat pengelolaan wisata yang bersifat masal dari karakteristik yang dimiliki, seperti dimana berorientasi pada volume yang tinggi dan paket wisata diselenggarakan oleh operator tur, adanya frekuensi musiman, asal wisata pada umumnya didominasi oleh turis asing, dan permintaan adalah elastis terhadap harga. Pada Tabel 3, orientasi pada volume yang tinggi karena perusahaan swasta yang mengelola pulau ini menginginkan memperoleh keuntungan yang besar, karena mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar dalam membangun infrastruktur pulau tersebut.

Tabel 3. Indikator Kebijakan Wisata Masal Dari Parameter Pasar.
Table 3. Mass Tourisme Policy Indicator From Market Parametre.

Elemen/element	Karakter dari wisata masal/mass tourism character	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta /island managed by private company	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh masyarakat / Island managed by community	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh pemerintah / island managed by goverment
Volume/ Volume	Bersifat masif dan tur diorganisasi oleh tur wisata / <i>Massif, organized by tour travel</i>	Tur diorganisasi oleh tur wisata/ <i>Massif, organized by tour travel</i>	Tur tidak diorganisasi oleh tur wisata/ <i>Organized by community</i>	Tur tidak diorganisasi oleh tur wisata/ <i>Non-massif</i>
Frekuensi musiman/ <i>Peak or low season</i>	Adanya musim kunjungan wisata / <i>Peak or low season</i>	Adanya musim kunjungan wisata (saat musim libur)/ <i>Peak season or low season</i>	Setiap minggu/ <i>Weekly</i>	Setiap minggu/ <i>Weekly</i>
Asal/ <i>Origin</i>	Pasar wisata didominasi turis domestik/ internasional/ <i>Foreigner or domestic</i>	Asing/ <i>Foreigner tourists</i>	Lokal/ <i>Local</i>	lokal/ <i>Local</i>
Permintaan/ <i>Demand</i>	Elastis pada harga / <i>Elasticity of the price</i>	Elastis pada harga / <i>Elasticity of the price</i>	Elastis pada harga / <i>Elasticity of the price</i>	Elastis pada harga / <i>Elasticity of the price</i>
Kesimpulan/ <i>Conclusion</i>		Wisata masal / <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal / <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Mass tourism</i>

Sumber : Pengamatan, wawancara dan Analisa peneliti, 2012
 Source : *Observation, interview and data processed, 2012*

Turis asing yang mendominasi pulau yang dikelola swasta, karena untuk mengunjungi pulau ini membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga turis lokal tidak mampu mengunjungi pulau ini. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, mengunjungi pulau ini tanpa mengikuti tur wisata adalah sangat sulit, karena tidak adanya transportasi umum yang mengantarkan turis ke pulau ini, karena itu pada umumnya turis menggunakan paket wisata yang ditawarkan oleh agen wisata. Selain itu, turis lokal kalangan menengah kurang mampu mengunjungi pulau yang dikelola swasta, karena tingginya biaya yang dibutuhkan. Tiket masuk ke pulau ini sekitar Rp 50.000 dan biaya penginapan sekitar Rp 600.000 per malam.

Untuk mengunjungi pulau yang dikelola oleh swasta, pengunjung harus berhubungan dengan agen wisata. Agen wisata ini pada umumnya membuat paket sehari perjalanan, untuk Pulau Bidadari sebesar Rp 250.000 dan Rp 300.000 untuk Pulau Ayer Besar. Pulau Bidadari lebih murah ketimbang Pulau Ayer besar, karena jarak Pulau Ayer Besar lebih jauh dan fasilitasnya lebih lengkap terutama untuk permainan *Jet ski*. Pulau yang dikelola oleh pemerintah, seperti Pulau Onrust, Kelor, dan Cipir, hanya membutuhkan Rp 75.000 untuk perjalanan sehari. Sedangkan pulau yang dikelola oleh masyarakat, membutuhkan dana sebesar Rp 350.000 untuk pergi ke Pulau Pramuka, karena akan memakan waktu dua hari (karena jaraknya yang jauh dan aktivitas selama yang membutuhkan waktu).

Pada Tabel 4, biaya perjalanan untuk berwisata ke pulau yang dikelola oleh pemerintah seperti Pulau Onrust, Cipir, dan Kelor lebih murah ketimbang pulau yang dikelola oleh swasta. Hal ini disebabkan pengunjung dapat menggunakan

transportasi umum (Rp 30.000 – 35.000), selain itu juga berkunjung ke pulau yang dikelola oleh pemerintah tidak ada tiket masuk, kecuali ingin berkunjung ke Pulau Onrust (Rp 2.000). Lihat perbandingan tiket masuk ke pulau yang dikelola oleh swasta sebesar Rp 50.000 (Pulau Bidadari dan Pulau Ayer besar). Pengunjung yang ingin pergi ke pulau yang dikelola oleh swasta harus menggunakan kapal yang disediakan oleh agen wisata, dimana harganya antara Rp 2 - 8 juta. Bandingkan dengan pergi ke pulau yang dikelola oleh pemerintah, pengunjung dapat menggunakan kapal nelayan dari Tanjung Pasir hanya menyewa kapal sebesar Rp 600.000.

Saat musim tertentu, pulau Bidadari dan Ayer Besar banyak dikunjungi oleh turis, misalnya pada saat liburan sekolah. Tingginya tingkat kunjungan pada musim tertentu adalah merupakan salah satu karakter wisata masal, bahkan pada saat tertentu tingkat kunjungan bisa melebihi daya dukung lingkungan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bulan Maret, 100-200 turis mengunjungi Pulau Bidadari dan Ayer Besar saat-saat musim libur. Akan tetapi, pada saat-saat bukan masa liburan jumlah pengunjung hanya 50 - 100 pengunjung. Padahal daya dukung lingkungan pulau Bidadari dan Pulau Ayer besar, masing-masing hanya 50 dan 30 turis untuk kategori rendah,

Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikator kebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkan dua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaan wisata. Pada umumnya turis yang berkunjung ke pulau yang dikelola oleh pemerintah dan oleh masyarakat adalah turis lokal, dan di kedua pulau ini pengelolaan

Tabel 4. Perbandingan Biaya Perjalanan di Kepulauan Seribu.

Table 4. Comparison of Travel Cost at Seribu Archipelago.

Pengelola / Organized by	Biaya Transportasi / Transportation cost (Rp /IDR)	Biaya Penginapan / Accomodation cost (Rp / IDR)	Tur Wisata / Travel cost (Rp / IDR)	Tiket Masuk / Ticket (Rp / IDR)
Swasta/ Private company	2,000,000 – 8,000,000 (Yacht)	600,000	250,000 – 300,000 (sehari/ Day)	50,000
Masyarakat/ Community	30,000 - 35,000 (Kapal umum / Boat)	50,000 – 350,000	350,000 (2 hari / 2 days)	Gratis / Free
Pemerintah/ Government	600,000 (Menyewa kapal nelayan / Boat rent)	Tidak ada hotel / No-existing hotel	75,000 (1 hari/ Day)	2,000

Sumber : Pengamatan, Wawancara dan Analisa Peneliti, 2012
 Source : Observation, Interview and Data Processed, 2012

wisata tidak berorientasi pada volume. Pengelolaan wisata di pulau yang dikelola oleh pemerintah untuk mengenalkan peninggalan sejarah ke generasi muda. Pengelolaan wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Indikator Kebijakan Dari Parameter Struktur Ekonomi

Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari elemen struktur ekonomie (peranan sektor wisata terhadap ekonomi lokal, kerjasama, sifat pembangunan wisata, dan *multiplier effect*). Keempat elemen tersebut memiliki karakter dimana sektor wisata mendominasi perekonomian, kerja sama ekonomi dilakukan dengan pihak di luar kepulauan Seribu (yaitu berasal dari Jakarta). Pembangunan wisata dilakukan secara ekstensif, dan pembangunan wisata memiliki *multiplier effect* yang rendah terhadap masyarakat

Pada Tabel 5, di pulau-pulau yang dikelola oleh swasta dan milik pribadi, dampak pembangunan wisata tidak dirasakan oleh

masyarakat. Pulau ini adalah milik konglomerat atau pejabat publik Indonesia, dimana ia mengelola sendiri pembangunan wisatanya dan jarang merekrut masyarakat lokal. Masyarakat lokal direkrut hanya untuk posisi kelas rendah seperti satpam dan pembersih. Para konglomerat dan pejabat Indonesia pada umumnya berasal dari Jakarta dan berasal dari luar pulau.

Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal. Hal ini bisa dilihat indikator kebijakan struktur ekonomi yang dimilikinya, yaitu sektor wisata tidak mendominasi perekonomian lokal, kerja sama wisata dilakukan dengan masyarakat lokal, pengembangan wisata tidak dilakukan secara ekstensif, dan memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap masyarakat lokal. Sebelumnya, sektor yang mendominasi perekonomian pulau-pulau ini adalah sektor perikanan, namun dari tahun ke tahun stok perikanan semakin menurun. Tingkat kunjungan wisata ke pulau yang dikelola oleh masyarakat, membuat mata pencarian masyarakat semakin beragam selain nelayan, seperti penjual makanan, pemilik penginapan, penjual souvenir, dan lain-lain.

Tabel 5. Indikator Kebijakan Wisata Masal Dari Struktur Ekonomi.
Table 5. Mass Tourism Policy Indicator From Structure Economic Parametre.

Elemen/element	Karakter dari wisata masal/ <i>Mass tourism character</i>	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta / <i>island managed by private company</i>	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh masyarakat/ <i>Island managed by community</i>	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh pemerintah / <i>Island managed by goverment</i>
Peran sektor wisata/ <i>Role of tourism sector</i>	Sektor wisata mendominasi perekonomian/ <i>Tourism sector dominates the economy</i>	Sektor wisata mendominasi perekonomian pulau / <i>Tourism sector dominates the economy</i>	Sektor perikanan dan wisata / <i>Fishery and tourism</i>	Sektor wisata tidak mendominasi perekonomian pulau / <i>Tourism sector not dominates the economy</i>
Aliansi/ <i>Alliance</i>	Memiliki hubungan yang didominasi dari luar / <i>Tourism dominated by the other island</i>	Jaringan dimiliki oleh non lokal / <i>Tourism dominated by the other island</i>	Jaringan dimiliki oleh lokal / <i>Tourism dominated by local</i>	Jaringan dimiliki oleh pemerintah dan lokal / <i>Tourism dominated by local and goverment</i>
Dilakukan/ <i>Developement</i>	Ektensif/ <i>Extensive*</i>	Ektensif/ <i>Extensive*</i>	Non –Ektensif / <i>Non- Extensive*</i>	Non-Ektensif/ <i>Non-Extensive*</i>
<i>Multiplier effect</i>	Multiplier effect sangat rendah / <i>Low multiplier effect*</i>	Rendah / <i>Low multiplier effect*</i>	Sangat tinggi / <i>High multiplier effect*</i>	Rendah / <i>Low multiplier effect*</i>
Kesimpulan/ <i>Conclusion</i>		Wisata masal/ <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Non-mass tourism</i>	Wisata non-masal / <i>Non-mass tourism</i>

Sumber : Pengamatan, Wawancara dan Analisa Peneliti, 2012/
Source : *Observation, Interview and Data Processed, 2012*
Ket: * Dilakukan dengan kuantitatif deskriptif dengan pembobotan

Pada pulau yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat lokal, masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan wisata. Hal ini bisa dilihat pembangunan usaha kecil lokal, muncul aktivitas baru untuk mendukung sektor wisata seperti penjual souvenir dan *guide*, dan munculnya usaha informal seperti pedagang asongan yang menjajakan makanan ke pengunjung. Bahkan ada juga nelayan yang berganti profesi pada saat tertentu mengantarkan pengunjung ke tempat penyelam. Hampir sama dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal, pulau-pulau yang dikelola pemerintah juga tidak menerapkan wisata masal, tapi ada satu elemen wisata masal yang eksis di pulau ini, yaitu sektor pariwisata mendominasi perekonomian lokal.

Indikator Kebijakan Dari Parameter Penginapan

Ditinjau dari indikator kebijakan penginapan, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan sedikit karakter dari wisata masal, hal ini bisa dilihat dari 5 elemen penginapan wisata masal, pulau-pulau ini menerapkan 3 elemen, yaitu (ukuran, organisasi penginapan dalam wilayah, dan pemilik). Ketiga elemen itu memiliki karakter pembangunan penginapan dilakukan dalam skala besar, terkonsentrasi pada wilayah wisata, dan penginapan tersebut pada umumnya dimiliki oleh pemilik yang bukan merupakan penduduk lokal dari Kepulauan Seribu. Pemilik penginapan di pulau wisata yang dikelola oleh swasta adalah pemilik pulau itu sendiri, dimana pemilik pulau swasta pada umumnya bukan penduduk lokal, tetapi adalah pengusaha dari Jakarta.

=Sedangkan untuk dua indikator kebijakan, yaitu bentuk arsitektur dan kepadatan penginapan, pengelolaan pulau wisata oleh swasta tidak mengindikasikan pengelolaan wisata masal, dimana tingkat kepadatan penginapan adalah tidak tinggi dan bentuk arsitektur bangunan yang masih menggunakan arsitektur tradisional. Penginapan, restaurant, di Pulau yang dikelola swasta (Pulau Bidadari dan Ayer Besar), pada umumnya terbuat dari kayu. Bahan bangunan ini dipilih karena arsitektur seperti ini sangat disukai pengunjung yang pada umumnya berasal dari luar negeri atau dari wisatawan domestik yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang menginginkan suasana pedesaan bukan perkotaan. Padahal menurut pengelola, perawatan bangunan yang menggunakan kayu ini sangat besar, apalagi penginapan kayu dibangun langsung di atas

permukaan laut. Lagipula penginapan kayu ini sangat rentan terhadap serangan rayap.

Kesamaan antara pemilik penginapan dengan pemilik pulau ini, membuat tidak ada pilihan lain bagi pengunjung dalam memilih penginapan, hal inilah yang menyebabkan harga penginapan di pulau ini lebih mahal ketimbang penginapan di pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat. Di pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta turis tidak bisa memilih penginapan, karena memakai sistem monopoli. Sedangkan di pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat, pengunjung bisa memilih tipe penginapan yang sesuai dengan keinginan mereka, karena banyak tipe penginapan yang ditawarkan. Tapi karena pengunjung di pulau-pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta merupakan turis asing, jadi harga sebesar Rp 600 ribu per malam, bukan termasuk mahal bagi mereka. Bagi turis domestik kalangan menengah ke bawah apalagi turis lokal, harga ini sangat mahal bagi mereka, hal ini jugalah yang membatasi kunjungan mereka ke pulau yang dikelola oleh swasta.

Pengunjung lokal meminta kepada pemerintah dan pengelola pulau untuk menurunkan harga hotel dan biaya masuk ke pulau yang dikelola oleh pemerintah. Menurut mereka harga tiket masuk sebesar Rp 50.000 dan harga hotel yang sebesar Rp 600.000 adalah harga yang tidak masuk akal. Tapi, pengelola pulau beralasan, harga tersebut mahal karena besarnya biaya investasi yang telah dikeluarkan dalam mengelola sebuah pulau kecil untuk tujuan wisata. Untuk mengelola suatu wisata di pulau-pulau kecil pengusaha harus membangun darmaga, jalan, dan jaringan listrik dengan sendiri. Selain itu mereka juga harus membayar biaya sewa pulau kepada pemerintah.

Pengunjung lokal juga berharap ada transportasi umum yang melayani pengunjung ke pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta. Menurut masyarakat lokal dari Kepulauan Seribu, dulu ada kapal pemerintah yang melayani turis untuk berkunjung ke pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta. Namun sekarang kapal tersebut hanya melayani pengunjung yang ingin pergi ke pulau-pulau yang ada penduduknya (Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan). Menurut pemerintah, penghentian pelayanan transportasi tersebut karena banyaknya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, padahal mereka yang berkunjung ke pulau tersebut pada umumnya adalah turis asing dan orang kaya.

Tabel 6. Indikator Kebijakan Wisata Masal Dari Parameter Penginapan.
Table 6. Mass Tourism Policy Indicator From Attraction Parameter.

Elemen/ Element	Karakter dari wisata masal/ Mass Tourism Character	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta / Island Managed by Private Company	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh masyarakat / Island Managed by Community	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh pemerintah / Island Managed by Government
Ukuran/Size	Penginapan dibuat pada skala besar/ <i>Large scale accommodation*</i>	Penginapan dibuat pada skala besar/ <i>Large scale accommodation*</i>	Penginapan dibuat pada skala kecil/ <i>Small scale accommodation*</i>	Tidak ada penginapan/ <i>No existing accommodation*</i>
Organisasi wilayah/Region organization	Pembangunan terkonsentrasi pada zona wisata/ <i>Concentration development on tourism sector</i>	Pembangunan terkonsentrasi pada zona wisata/ <i>Concentration development on tourism sector</i>	Pembangunan tidak terkonsentrasi pada zona wisata/ <i>Concentration development on fishery and tourism sector</i>	Pembangunan tidak terkonsentrasi pada zona wisata/ <i>Concentration development on tourism sector and conservation</i>
Kepadatan/Density	Kepadatan bangunan tinggi/ <i>High Accommodation*</i>	Kepadatan bangunan tinggi/ <i>High accommodation*</i>	Kepadatan bangunan tinggi/ <i>High accommodation*</i>	Kepadatan bangunan rendah/ <i>No-existing accommodation*</i>
Arsitektur/ Architectur	Akomodasi memiliki gaya internasional/ <i>The accommodation has an international style</i>	Bergaya tradisional/ <i>The accommodation has a local style</i>	Bergaya tradisional dan internasional/ <i>The accommodation has an international style and local style</i>	Bangunan peninggalan Belanda/ <i>Historic</i>
Pemilik/Owner	Akomodasi milik perusahaan besar non lokal / <i>Owner of accomodation is big non local company</i>	Akomodasi milik perusahaan besar non lokal / <i>Owner of accomodation is big non local company</i>	Akomodasi milik perusahaan kecil lokal/ <i>Owner of accomodation is community</i>	Tidak ada penginapan/ <i>No-existing accomodation</i>
Kesimpulan/ Conclusion		Wisata masal/ <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Non-mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Non-mass tourism</i>

Sumber : Pengamatan, Wawancara dan Analisa Peneliti, 2012/Source : *Observation, Interview and Data Processed, 2012*
 Ket: * Dilakukan dengan kuantitatif deskriptif dengan pembobotan

Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat lokal, dari 5 indikator kebijakan wisata masal dari sisi penginapan, pada pulau-pulau ini hanya eksis satu indikator kebijakan saja yaitu kepadatan akomodasi yang termasuk pada kategori tinggi. Ada beberapa bangunan akomodasi yang memiliki bentuk arsitektur internasional. Beberapa pemilik akomodasi yang diwawancarai, pemilihan arsitektur non lokal (minimalis) karena mudah dalam biaya perawatan. Selain itu, berbeda dengan turis asing yang berkunjung ke pulau yang dikelola swasta menyukai arsitektur tradisional, wisatawan yang berkunjung ke pulau yang dikelola oleh masyarakat lebih menyukai arsitektur minimalis. Wisatawan yang berkunjung ke pulau yang dikelola oleh masyarakat pada umumnya

berasal dari kalangan menengah dan berasal dari Jabodetabek. Penginapan di pulau ini umumnya dimiliki oleh penduduk lokal, bukan dari pengusaha yang berasal dari luar pulau.

Indikator Kebijakan Dari Parameter Peraturan

Ditinjau dari indikator kebijakan dari sisi parameter peraturan, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari indikator peraturan (pengawasan, kuantitas aturan, idiologi, tekanan, pemilik). Kelima elemen tersebut memiliki karakter dimana jumlah aturan yang dibuat sangat sedikit untuk memberikan keleluasaan pada perusahaan swasta, aturan yang dibuat mendukung sistem

pasar bebas, jumlah aturan yang dibuat sedikit sekali, adanya tekanan ekonomi terhadap aturan yang ada, dan kepemilikan dalam pembangunan wisata didominasi oleh pemilik non lokal. Kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swasta sangat lemah. Pengelolaan pulau yang dikelola oleh swasta ini diberikan oleh pemerintah ke penyewa swasta saat perjanjian penyewaan pulau. Biasanya pulau-pulau tersebut disewakan untuk pembangunan wisata dan perikanan budidaya.

Penyewa pulau wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama masalah tujuan pengelolaan pulau. Jika pengelola pulau tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, pulau tersebut ditujukan untuk pengelolaan wisata, namun pada kenyataannya

pulau tersebut ditujukan untuk kegiatan lain, maka pemerintah bisa mencabut izin pengelolaan pulau tersebut. Namun pada kenyataannya, fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan pulau sangat lemah sekali, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, masalah besar di Indonesia adalah banyaknya petugas pengawas hukum yang bisa disuap oleh para pelanggar hukum.

Pada kenyataannya, pada pulau-pulau yang dikelola oleh swasta adalah dominasi peran swasta dalam. Pada Tabel 7 dapat dilihat penentuan pengelolaan pulau, peran pemerintah dalam penegakan aturan sangat lemah sekali. Misalnya penetapan harga tarif masuk yang bagi turis lokal sangat mahal sekali, akhirnya harga tarif masuk yang tinggi ini membatasi turis lokal untuk menikmati keindahan Kepulauan Seribu. Pada

Tabel 7. Indikator Kebijakan Wisata Masal Dari Parameter Peraturan.
Table 7. Mass Tourism Policy Indicator From Rule Parameter.

Elemen / Element	Karakter dari wisata masal / Mass Tourism Character	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta / Island Managed by Private Company	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh masyarakat / Island Managed by Community	Pulau-pulau wisata yang dikelola oleh pemerintah / Island Managed by Government
Kontrol/ <i>Control</i>	Peraturan dikontrol oleh sektor swasta/ <i>Law controlled by private sector</i>	Peraturan dikontrol oleh sektor swasta/ <i>Law controlled by private sector</i>	Peraturan dikontrol oleh masyarakat lokal/ <i>Law controlled by community</i>	Peraturan dikontrol oleh pemerintah/ <i>Law controlled by government</i>
Kuantitas/ <i>Quantity</i>	Aturan yang dibuat mengakomodasi kepentingan swasta/ <i>Rules just accommodate the private interests</i>	Aturan yang dibuat mengakomodasi kepentingan swasta/ <i>Rules just accommodate the private interests</i>	Aturan yang dibuat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal/ <i>Rules just accommodate the community interests</i>	Aturan yang dibuat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan pemerintah/ <i>Rules just accommodate the government and local interests</i>
Prinsip / <i>Principle</i>	Menganut ideologi pasar bebas(input/output)/ <i>Market free ideology</i>	Menganut ideologi pasar bebas(input/output)/ <i>Market free ideology</i>	Menganut ideologi pasar bebas(input/output)/ <i>Market free ideology</i>	Menganut ideologi pasar bebas (input/output)/ <i>Market free ideology</i>
Penekanan/ <i>Attention</i>	Aturan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi / <i>Rule-oriented economic growth</i>	Aturan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi/ <i>Rule-oriented economic growth</i>	Aturan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi lokal/ <i>Rule-oriented economic local growth</i>	Aturan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga bangunan bersejarah/ <i>Rule-oriented economic local growth</i>
Pemilik/ <i>Owner</i>	Pemilik perusahaan besar non lokal/ <i>Owner is big non local company</i>	Pemilik perusahaan besar non lokal/ <i>Owner is big non local company</i>	Pemilik perusahaan masyarakat lokal dalam skala kecil/ <i>Owner is small local company</i>	Dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat lokal/ <i>Owner is government</i>
Kesimpulan/ <i>Conclusion</i>		Wisata masal/ <i>Mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Non-mass tourism</i>	Wisata non-masal/ <i>Non-mass tourism</i>

Sumber : Pengamatan, Wawancara dan Analisa Peneliti, 2012
Source : Observation, Interview and Data Processed, 2012

kenyataannya adalah keindahan pulau tersebut banyak dinikmati oleh turis asing. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam penentuan harga tiket masuk, karena menurut pemerintah harga itu ditentukan oleh permintaan, jika permintaan tinggi maka harganya akan naik. Padahal dalam tahap awal perjanjian sewa menyewa, penduduk lokal harus diberi akses terhadap Kepulauan Seribu.

Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat lokal, dari sisi indikator kebijakan peraturan, pulau-pulau ini tidak menerapkan wisata masal. Hal ini bisa dilihat dari tidak ada satu pun elemen wisata masal eksis, dimana peraturan wisata dikontrol oleh pemerintah dan masyarakat lokal, dan kepemilikan *homestay* atau restoran berasal dari penduduk lokal. Namun ada kelemahannya dalam pelaksanaan, dimana antara pelaksanaan dan perencanaan sering tidak sesuai. Misalnya, Pulau merupakan pulau yang terletak di wilayah konservasi, berarti pengelolaan wisata di pulau tersebut harus dibatasi. Namun pada kenyataannya, setiap tahun ada 9.600 penyelam yang melakukan aktivitas menyelam di pulau tersebut. Padahal menurut daya dukung lingkungan, hanya boleh 5.000 - 6.000 orang. Lagi pula, pulau yang dikelola oleh masyarakat selain ditujukan untuk pemukiman, juga untuk wisata, setiap tahun ada peningkatan jumlah penginapan di Pulau yang dikelola oleh masyarakat.

PENUTUP

Di Kepulauan Seribu, terutama di pulau-pulau yang dikelola oleh swasta ada beberapa indikator kebijakan dari pembangunan wisata masal yang diterapkan. Kebijakan pembangunan wisata masal ini dikuatkan tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kepulauan Seribu yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Implikasi kebijakan pada pembangunan wisata masal adalah terlalu komersial, mengabaikan aspek sosial seperti keterlibatan masyarakat, hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pengunjung.

Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan jumlah pengunjung sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Orientasi ini banyak dilakukan pada pulau-pulau yang dikelola swasta karena pengelola ingin modal yang diinvestasikan kembali dalam waktu cepat. Pengelola pulau telah menginvestasikan banyak modal untuk pembangunan infrastruktur pulau, seperti darmaga,

jalan, hotel, kolam renang, dan lain-lain. Implikasi lain dari kebijakan pembangunan wisata masal pada pulau yang dikelola oleh swasta adalah banyak pengunjung non lokal (asing) dan domestik dari kalangan atas yang berkunjung ke pulau yang dikelola swasta ini disebabkan biaya yang cukup tinggi untuk berkunjung, dimana turis lokal tidak mampu membayarnya.

Implikasi lainnya dari kebijakan pembangunan wisata masal adalah sektor wisata mendominasi perekonomian di pulau yang dikelola swasta, dimana dilakukan secara ekstensif akan tetapi *multiplier effect*-nya sedikit sekali karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Sebaliknya pulau yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kurang mengaplikasikan indikator pembangunan wisata masal. Dari hasil analisis pengelolaan wisata masal atau tidak masal dari penelitian ini, terlihat bahwa semua pulau yang dikelola oleh perusahaan swasta, menerapkan wisata masal, baik dilihat dari parameter pasar, atraksi, penginapan, struktur ekonomi, dan aturan. Padahal jika dilihat dari karakteristik kepulauan Seribu yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang sangat rawan terhadap perubahan lingkungan, maka pengembangan wisata masal tidak cocok untuk kepulauan ini, harusnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu harus dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip wisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardole, E. dan P. Serdone. 2008. Tourism In Archipelagos: Hawai'i and the Balearics. *Annals Of Tourism Research* 35 (4): 900-923.
- Cournayer, N. 2005. *Le Tourisme De Masse Durable*. Sciences De La Gestion.
- Fly, H. R., N. Couzens dan G. Wilson. 2008. Measuring the Environmental Impact of Travel: Business Intelligence for Informed Travel Choice. *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008*. World Economic Forum.
- Shaw, G. dan A. M. Williams. 2002. *Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective*, 2^{ème} Édition, Oxford. GB Blackwell Publishers.
- Sorupia, E. 2005. Rethinking the Role of Transportation in Tourism. *Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies* 5: 1767 - 1777. Faculty of Architecture, Building and Planning. The University of Melbourne.

- Stock, M., O. Dehornee dan P. Duhamel. 2006. *Le tourisme, Acteurs, Lieux, Et enjeux. La Géographie aux édition belin.*
- UNWTO. 2005. *Tourism Highlights.* United Nations World Tourism Organization.
- Uyarra, M. C., A. R. Watkinson dan I. M. Cote. 2009. *Managing Dive Tourism for The Sustainable Use of Coral Reefs. Environment and Management Journal 43 (2):1-16.*
- Weaver, D. 1991. *Alternative to Mass Tourism in Dominica.* Pegamon Press.
- Weaver, D. B. 2000. *A Broad Context Model of Destination Development Scenarios. Tourism Management 21 (3).*